

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi membutuhkan peran penting penduduk sebagai penggerak atau subjek yang menjalankan proses pembangunan, diawali dengan perhatian pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah banyak di setiap tahunnya mengakibatkan angkatan kerja yang ikut bertambah. Masalah ketenagakerjaan secara terus menerus telah menjadi masalah yang berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menjadikan masalah ketenagakerjaan terus memburuk (Hidayah & Aji, 2022).

Permasalahan tersebut juga terjadi di Indonesia, dimana merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Dengan banyaknya jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi besar sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi. Namun masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dimana jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar tidak menjadi aset yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian, namun malah menjadi penghambat negara dalam pembangunan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Indonesia tercatat mencapai 152,11 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 4,40 juta orang dibandingkan dengan 147,71 juta orang pada Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 144,64 juta orang bekerja, sementara 7,47 juta orang berada dalam status pengangguran. (Badan Pusat Statistik). Pengangguran merupakan seseorang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan (Badan Pusat Statistik). Menurut (Yoga, 2021) pengangguran adalah suatu kondisi untuk usia angkatan kerja pada rentang 15-65 tahun yang memang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak melakukan pencarian pekerjaan contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa Sekolah Menengah Pertama, siswa Sekolah Menengah Atas, mahasiswa, serta lainnya dikarenakan belum membutuhkan pekerjaan.

Pengangguran terbagi menjadi dua yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup. Seseorang dapat dikatakan pengangguran terbuka jika ia tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan sedang berusaha mencari pekerjaan, sedangkan pengangguran tertutup adalah seseorang yang memiliki produktivitas rendah, pendapatan rendah, tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta memiliki jam kerja tidak menentu yaitu ≤ 35 Jam selama satu minggu. Pengangguran terjadi ketika jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Selain itu, ketidaksesuaian kompetensi para pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi penyebab utama pengangguran (Yoga, 2021).

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang berdampak pada keberlangsungan hidup seseorang secara langsung. Besarnya pengangguran dapat

menghambat pembangunan ekonomi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan tidak mempunyai pendapatan. Tiadanya pendapatan menyebabkan berkurangnya biaya konsumsi dan hal ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan (Fikriah, 2020).

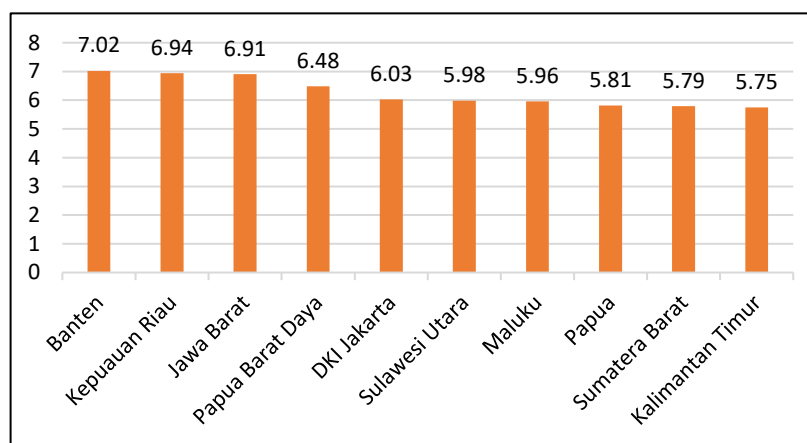
Masalah pengangguran tidak hanya dialami oleh negara berkembang saja, namun masalah pengangguran ini juga dialami oleh negara-negara yang sudah maju dan masalah pengangguran juga menjadi masalah terbesar bagi sebuah negara. Standar hidup suatu negara dapat dilihat dari jumlah pengangguran yang dimilikinya (Mankiw, 2020). Menurut (Susiatun, 2018) dampak dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang, sehingga bisa menjebak masyarakat ke dalam rantai kemiskinan dikarenakan tidak memiliki pendapatan dan juga menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dan pengangguran merupakan dua aspek yang saling terkait dalam konteks pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai melalui peningkatan konsumsi, mencerminkan taraf hidup yang lebih unggul bagi penduduk setempat. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui berbagai indikator, termasuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Ketika pengangguran meningkat, dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan Masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas atau pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini mengakibatkan kurangnya tenaga kerja terampil

yang dapat memenuhi kebutuhan industri, sehingga memperburuk situasi pengangguran (Kasim et al., 2021).

Masalah pengangguran di Indonesia menjadi cukup kompleks karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, serta telah menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Pulau Jawa, tetapi juga merambah ke daerah lainnya, termasuk Pulau Kalimantan.

Gambar 1.1 10 Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di Indonesia Tahun 2024 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Data diatas menunjukkan pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat ke-10 provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia, dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 5,75%. Selama tahun 2018-2024 pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2020, yang mana tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 6,87% akibat dampak besar dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak sektor usaha terpaksa ditutup dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran

terbuka mencapai angka 6,83%. Selanjutnya, pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,71% yang menunjukkan penurunan sebesar 1,12 % dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 5,31%, turun 0,40 % dibandingkan dengan tahun 2022. Terakhir pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,75% naik 0,44 % dibandingkan dengan tahun 2023 (Badan Pusat Statistik).

Fluktuatifnya pengangguran menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja bertujuan agar lebih banyak angkatan kerja dapat terserap, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak mampu menyerap angkatan kerja yang ada mengindikasikan adanya kegagalan kebijakan pembangunan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakmampuan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dapat membuat seseorang menjadi tidak produktif dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Silaswara et al., 2021). Hal tersebut pada akhirnya dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan kemiskinan.

Masalah pengangguran masih menjadi isu strategis dalam pembangunan di tingkat daerah. Mengurangi pengangguran termasuk salah satu agenda yang diprioritaskan dalam pembangunan yang tertera pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menanggulangi pengangguran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bekerja untuk menekan pengangguran dengan cara

membuka lapangan pekerjaan di berbagai sektor guna mengimbangi adanya tambahan angkatan kerja baru yang bertambah setiap tahunnya.

Dalam mengatasi masalah pengangguran, perlu diketahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingginya pengangguran sehingga dapat dirumuskan suatu alternatif kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan barang maupun jasa yang telah di produksi dalam masyarakat dapat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur keberhasilan ekonomi pada suatu wilayah (Sukirno, 2021).

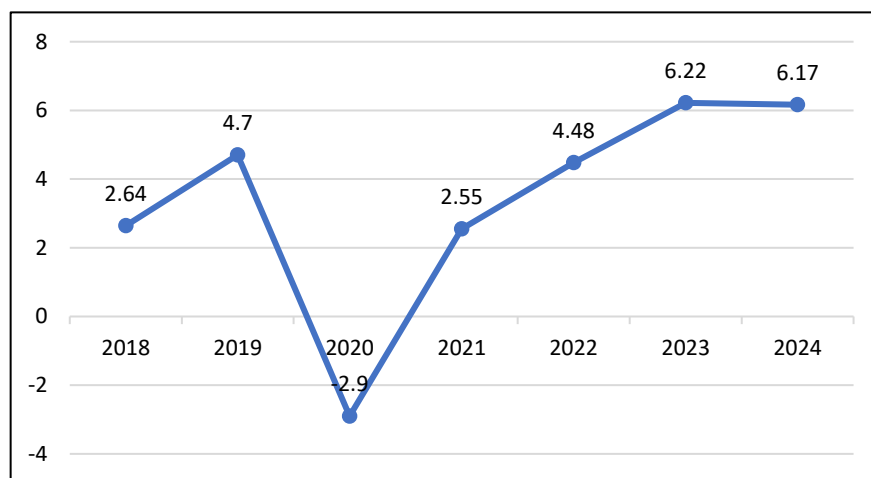
Pertumbuhan ekonomi belum dapat dianggap berhasil jika terdapat beban sosial yang meningkat, peningkatan tingkat pengangguran, distribusi pendapatan tidak merata, dan peningkatan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (Pratama et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan yang ditentukan oleh perubahan jumlah penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan output nasional, serta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Boediono, 2018).

Menurut hukum Okun (Okuns Law) peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Hukum Okun menjelaskan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5% di atas

tren normal berpotensi menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1%. Artinya, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pengangguran dan kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi meningkat akan diikuti oleh peningkatan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa. Untuk menghasilkan barang dan jasa tentunya membutuhkan sumber daya seperti tenaga kerja, tenaga kerja inilah yang akan melakukan proses produksi sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan nilai laju PDRB yang mana merupakan salah satu indikator keberhasilan ekonomi di suatu daerah. Dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi perkembangan aktivitas ekonomi yang dapat menaikkan produksi barang atau jasa sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan meningkatnya peluang kerja.

Gambar 1.2 Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2024 (%)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat selama 8 tahun terakhir laju PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,06 % dibandingkan tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi -2,90 % dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan. Setelah pandemi berakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja menyebabkan kesempatan kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung para pencari pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga akan meningkatkan produksi suatu daerah dan diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga akan menurunkan pengangguran (Ibiyantoro & Imaningsih, 2022).

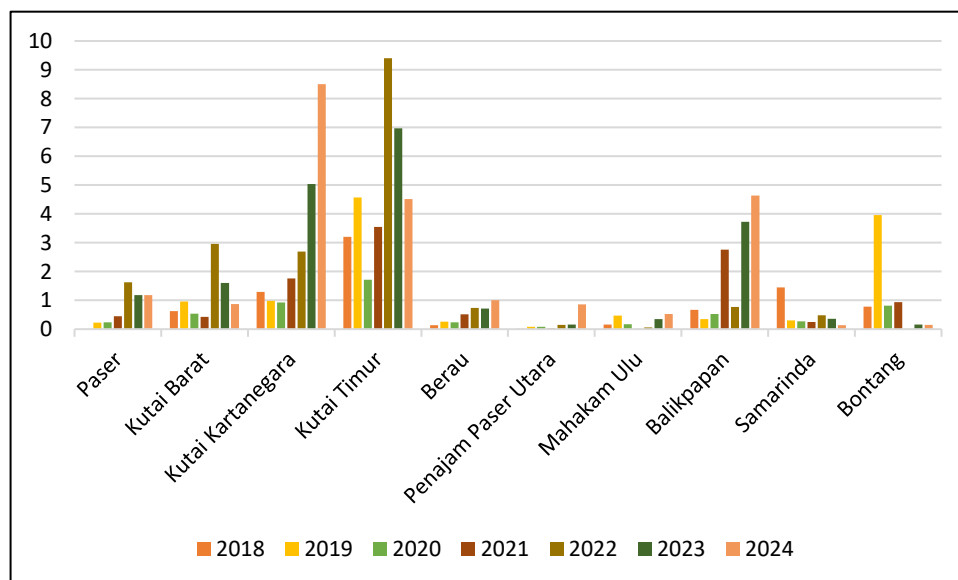
Selain pertumbuhan ekonomi investasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengangguran. Investasi merupakan input suatu kegiatan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong investasi. Investasi yang semakin tinggi maka akan semakin besar mempengaruhi rendahnya pengangguran, sebaliknya jika jumlah investasi menurun maka pengangguran akan meningkat.

Investasi berkontribusi pada akumulasi modal bertujuan guna menaikkan potensi wilayah dan membangun pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam pertumbuhan ekonomi unsur investasi merupakan faktor yang sangat penting dalam

peningkatan kapasitas produksi ataupun jumlah industri, peningkatan investasi ini sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi baik permintaan dari dalam negeri. Investasi sendiri merupakan salah satu komponen penting, dengan penambahan material modal yang merupakan imbas dari investasi nantinya akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perusahaan di masa depan, akibatnya akan terjadi penambahan terhadap kebutuhan akan tenaga kerja yang terserap.

Menurut (Restiani & Pahlevi, 2023) peningkatan jumlah investasi baik dari dalam dan luar negeri yang sesuai dengan target dan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Gambar 1.3 Realisasi Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber : DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren yang

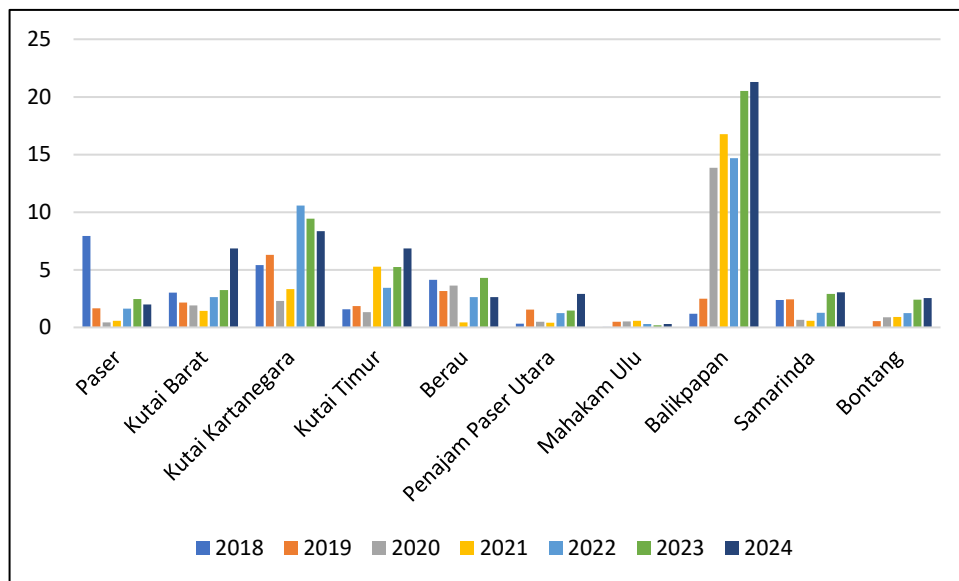
positif, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara menjadi penyumbang terbesar, didominasi oleh sektor pertambangan, perkebunan, dan industri logam. Pada 2018 realisasi PMA mencapai sekitar 8,34 triliun yang mencerminkan minat kuat investor asing meskipun sempat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019, target PMA Kaltim dipatok sekitar Rp. 12,72 triliun dan realisasinya cenderung stabil karena masih dipengaruhi kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Tahun 2020, pandemi COVID-19 memberi tekanan pada iklim investasi akan tetapi PMA tetap masuk, khususnya di sektor pertambangan dan industri makanan.

Kinerja investasi membaik di 2021, dengan total PMA mencapai Rp. 10,6 triliun. Peningkatan ini juga didorong oleh masuknya investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sehingga Kalimantan Timur masuk peringkat 10 besar realisasi PMA nasional pada 2021. Memasuki 2022, tren positif masih terus berlanjut, dengan PMA mencapai Rp18,86 triliun. Pada 2023, PMA di Provinsi Kalimantan Timur kembali meningkat dua persen lebih secara tahunan, yaitu sebesar Rp20,58 triliun. Pada tahun 2024 PMA mencapai Rp22,38 triliun, yang terealisasi melalui lebih dari 3.000 proyek tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kutai Kartanegara menjadi magnet utama investasi asing, memberikan kontribusi terbesar dengan nilai Rp8,06 triliun, diikuti oleh Balikpapan dan Kutai Timur. Investasi asing didominasi oleh sektor pertambangan yang menyumbangkan Rp5,48 triliun, diikuti sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp4,20 triliun, serta industri logam dasar Rp3,52 triliun. Investor dari Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan Spanyol menjadi penyumbang terbesar, dengan total kontribusi empat negara tersebut mencapai sekitar 64,78% dari keseluruhan

investasi asing di Kaltim. Secara keseluruhan, realisasi PMA di Kalimantan Timur sepanjang 2018-2024 menunjukkan pertumbuhan positif, memperkuat peran provinsi ini sebagai salah satu destinasi utama investasi asing di Indonesia.

Gambar 1.4 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber : DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas diatas perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2018 realisasi PMDN mencapai sekitar Rp. 25,94 triliun, Kabupaten Paser menjadi daerah dengan penerimaan investasi domestik terbesar, yaitu mencapai Rp 7,94 triliun. Pada 2019 realisasi PMDN mencapai Rp. 22,47 triliun, kontribusi PMDN didominasi oleh beberapa kabupaten/kota utama seperti Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencatat nilai realisasi PMDN sebesar Rp3,76 triliun, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan investasi domestik terbesar pada tahun ini, yaitu mencapai 6,3 triliun.

Tahun 2020 realisasi PMDN mencapai 25,93 triliun, Kota Balikpapan menjadi lokasi dengan realisasi PMDN tertinggi mencapai Rp 13,84 triliun. mencerminkan kinerja investasi yang kuat dan relatif merata di beberapa sektor utama, meskipun dalam kondisi pandemi global yang memberikan tantangan besar. Pada tahun 2021 setelah PMDN mencapai Rp. 30,29 triliun, penurunan kasus pandemi COVID-19 juga mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu pemicu utama percepatan investasi, khususnya di sektor konstruksi.

Memasuki tahun 2022, tren positif masih terus berlanjut, dengan PMDN mencapai Rp39,59 triliun. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur berhasil merealisasikan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp 52,17 triliun dari total investasi, yang melebihi target tahun tersebut. Realisasi PMDN ini berasal dari sekitar 15.490 proyek, yang didominasi oleh sektor industri kimia dasar, pertambangan, dan sektor agribisnis seperti tanaman pangan dan peternakan. Investasi PMDN ini tersebar luas di seluruh kabupaten/kota, dengan Kota Balikpapan sebagai kontributor utama. Terakhir pada tahun 2024 realisasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur Rp 55,07 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 15.390.

Pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat kelima nasional untuk realisasi PMDN. Kontribusi terbesar investasi PMDN berasal dari sektor pertambangan dengan nilai sekitar Rp 20,98 triliun, diikuti oleh sektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi sebesar Rp 8,5 triliun, serta industri logam dasar dan barang logam bukan mesin sekitar Rp 6,96 triliun. Secara

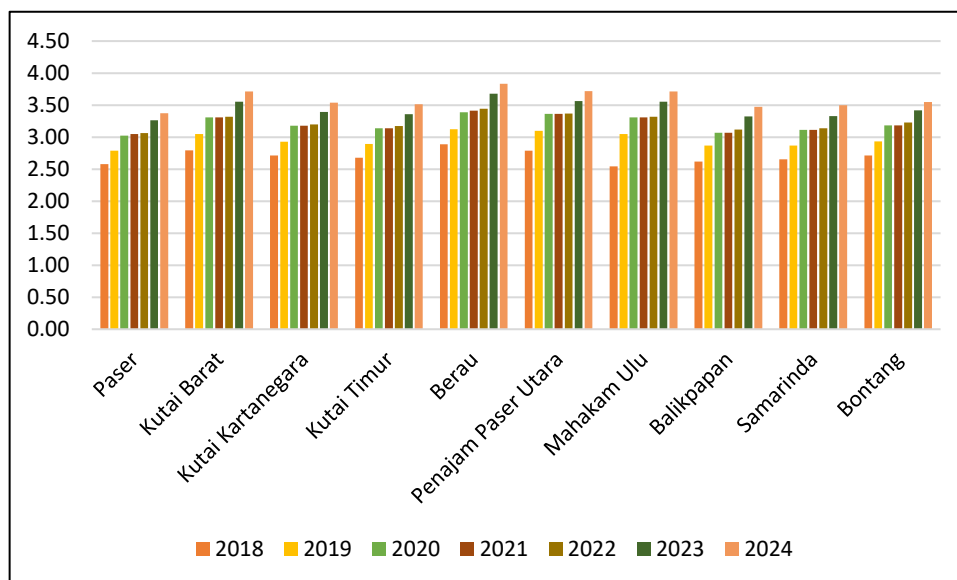
keseluruhan, realisasi PMA di Kalimantan Timur sepanjang 2018-2024 menunjukkan pertumbuhan positif, memperkuat peran provinsi ini sebagai salah satu destinasi utama investasi asing di Indonesia. Dukungan infrastruktur yang terus dikembangkan serta kebijakan pemerintah yang kondusif turut memperkuat daya tarik Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat investasi strategis di Indonesia.

Selain investasi, upah minimum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masalah pengangguran. Kebijakan upah minimum yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong produktivitas. Namun, jika tidak disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja, kebijakan ini bisa mengakibatkan peningkatan pengangguran, terutama di sektor informal dan usaha kecil. Upah minimum adalah tingkat upah paling rendah yang masih boleh dibayarkan perusahaan kepada para pekerjanya. Hampir setiap tahun, tenaga kerja atau buruh di Indonesia selalu melakukan demonstrasi. Masalah yang dipermasalahkan adalah soal kesejahteraan, menuntut kesejahteraan yang lebih baik dengan menuntut pemerintah untuk selalu menaikkan upah minimum.

Upah merupakan salah satu indikator penting dalam hubungannya dengan kesempatan kerja. Upah minimum diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor per – 01 / men / 1999. Upah minimum di setiap daerah ditetapkan agar pekerja memperoleh hak yang sepantasnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya demi kesejahteraan di lingkungan tempat tinggal mereka. Besar atau kecilnya tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah akan berpengaruh pada permintaan tenaga kerja. Upah harus mencerminkan apa yang telah diberikan oleh pekerja kepada perusahaan.

Penetapan upah minimum harus dilakukan dengan tepat, apabila upah minimum ditetapkan terlalu tinggi melebihi produktivitas pekerja hal tersebut dapat menyebabkan pengangguran karena pemberi kerja tidak mampu membayar upah tersebut. Maka, perlu dicapai keseimbangan yang tepat untuk memastikan bahwa upah minimum dapat membantu mengurangi pengangguran tanpa merugikan pemberi kerja.

Gambar 1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2018-2024 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur 2025, (diolah)

Berdasarkan gambar diatas selama tahun 2018 – 2024 upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan yang berkisar antara Rp.100.000 sampai Rp.300.000 di setiap daerah. Kenaikan upah tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Penetapan upah berdampak positif karena kenaikan upah dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja. Sedangkan dari sisi perusahaan kenaikan upah menjadi dampak negatif, karena

harus menambah biaya produksi dan akhirnya perusahaan mengurangi jumlah pekerjanya dan tingkat pengangguran menjadi naik.

Upah memiliki arti penting antara tenaga kerja dengan perusahaan, keduanya saling membutuhkan dan memperhatikan tingkat upah pada suatu daerah, keadaan ini sangat penting bagi kedua pihak karena keberadaanya dapat mendorong iklim usaha yang harmonis bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut (Yacoub & Firdayanti, 2019) upah yang tinggi dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja, sehingga akan menyebabkan produksi yang dihasilkan meningkat, sehingga upah yang naik mengakibatkan masyarakat menawarkan tenaga kerja kepada perusahaan meningkat, dan pengangguran turun.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran disuatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum kabupaten/kota. Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Apakah penanaman modal asing berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur ?
3. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur ?
4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dari pokok masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama rentang waktu 2018 hingga 2024. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengangguran terbuka di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan variabel pendukung seperti pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan upah minimum.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baru dalam proses pengerjaannya.
- b. Untuk Universitas : penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi yang dapat diperuntukan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Pemerintahan Daerah : Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang informasi tambahan kepada pemerintah daerah dalam menentukan progam-program yang tepat untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Untuk Pembaca : Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Serta bisa dijadikan referensi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum kabupaten/kota dan tingkat pengangguran terhadap tingkat pengangguran terbuka.